

**IMPLIKASI PRINSIP NEGARA HUKUM TERHADAP
INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

TESIS

Oleh:

Luhut Simbolon

2402198079



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLIKASI PRINSIP NEGARA HUKUM TERHADAP
INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Luhut Simbolon

2402198079



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luhut Simbolon

NIM : 2402198079

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019:**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil perkuliahan, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister hukum di Universitas Kristen Indonesia dan Universitas lainnya, kecuali pada bagian-bagian suber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tulis akhir saya ini dianggap batal

Jakarta, 8 Juni 2026



Luhut Simbolon
NIM: 2402189079



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR TESIS

**"IMPLIKASI PRINSIP NEGARA HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019"**

Oleh:

Nama : Luhut Simbolon
Nim : 2402198079
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

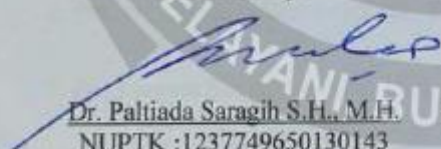
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

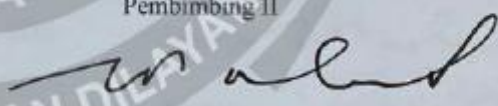
Jakarta, 8 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

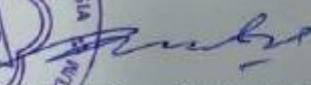
Pembimbing II

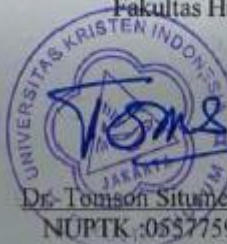

Dr. Paltiada Saragih S.H., M.H.
NUPTK :1237749650130143


Pdt. Dr. Marudut Silitonga STH., S.H., M.H.
NUPTK :6660744645130072



Ketua
Program Studi Hukum Program
Magister


Dr. Paltiada Saragih S.H., M.H.
NUPTK :1237749650130143



Pjs Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Tomson Situmeang S.H; M.H
NUPTK :0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 8 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Luhut Simbolon
Nim : 2402189079
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Paltiada Saragih S.H., M.H.	Ketua	
2. Pdt. Dr. Marudut Silitonga STH., S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 8 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luhut Simbolon

Nim : 2402189079

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **"Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019"**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas Akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademik yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 8 Juni 2026



Luhut Simbolon
NIM: 2402189079

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur patut disampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya yang tak terhingga sehingga tugas akhir tesis ini bisa selesai tepat waktu, walaupun disana sini masih terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu, memberi dukungan, bimbingan dan support sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Teruntuk kepada:

1. Yth, Ibu Rektor Universitas Kristen Indonesia Prof. Dr. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada saya menimba Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia yang membanggakan ini.
2. Dewan Pembimbing Yth, Bapak Dr. Paltiada Saragih, S.H., M.H dan Bapak Dr. Marudut Silitonga S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberilan masukan dan saran yang konstruktif selama dalam proses penulisan tesis ini yang dijadikan penulis sebagai acuan dan fondasi penting dalam penulisan hingga selesainya skripsi ini.
3. Dewan Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Istri tercinta dr. Tina Nurialam Manurung dan anak-anak saya yang saya banggakan, dr. Beatrice Lorencia Asima Simbolon, Letda. Inf. David Torkis Simbolon, Marcellino Triluna Simbolon dan Samuel Anugerah Simbolon yang sangat peduli dalam memberikan support dan dorongan yang kuat sehingga penulis selalu antusias dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dekan, Kaprodi dan Para Dosen Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang menambah khasanah penulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini

6. Para Dosen Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang menambah lhasanah penulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 24 yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga lebih terpacu dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu langsung atau tidak langsung yang ikut berkontribusi dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga seluruh bantuan , dukungan dan bimbingan yang Bapak/Ibu berikan kiranya Tuhan balaskan melalui berkat dan anugerah yang berlipat ganda dalam kehidupan Bapak/Ibu di kemudian hari.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat sekecil apapun dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

Jakarta, 8 Juni 2026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR TESIS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Orisinalitas Penelitian.....	20
H. Rencana Sistematika Penulisan	22
A. Tinjauan Umum Kerangka Teori	25
2. Konsep negara hukum	33
3. Teori Kepastian Hukum.....	41
4. Asas Kepastian Hukum.....	49
B. Tinjauan Umum Kerangka Konsep	50
1. Implikasi	50
2. Independensi.....	52
3. Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistim Ketatanegaraan	57
BAB III	61
A. Konsep Negara Hukum dalam Sistim Demokrasi.....	61
B. Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia.....	67

C. Implikasi Prinsip Negara Hukum Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	72
1. Implikasi terhadap Supremasi Hukum	73
2. Implikasi terhadap <i>Equality Before the Law</i>	74
3. Implikasi terhadap Due Process of Law	75
4. Implikasi terhadap Checks and Balances	76
5. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia	79
BAB IV	81
A. Sejarah Lahirnya KPK dan Landasan Pembentukannya	81
B. Implikasi atas perubahan UU No 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK 83	
C. Urgensi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 19 Tahun 2019.....	85
D. Perubahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan Dampaknya terhadap independensi KPK.....	89
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

IMPLIKASI PRINSIP NEGARA HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat terwujudnya tujuan negara hukum dan pemerintahan yang bersih. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terjadi sejumlah perubahan mendasar yang memengaruhi kedudukan, kewenangan, dan independensi KPK, antara lain pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi prinsip negara hukum terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi KPK merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum, khususnya prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan penegakan hukum yang bebas dari intervensi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah membawa implikasi terhadap independensi KPK melalui penguatan mekanisme pengawasan dan perubahan struktur kelembagaan yang berpotensi mengurangi ruang independensi dalam pelaksanaan fungsi pemberantasan korupsi. Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinilai telah mengubah karakter KPK dari lembaga independen yang bersifat khusus menjadi lembaga yang lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, perlu jaminan hukum terhadap independensi KPK agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Negara Hukum, Independensi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF THE PRINCIPLE OF THE LEGAL STATE ON THE INDEPENDENCE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) AFTER LAW NUMBER 19 OF 2019.

Corruption is one of the main issues hindering the realization of the rule of law and clean governance. Law No. 19 of 2019 on the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission introduced a number of fundamental changes that affect the status, authority, and independence of the KPK, including the establishment of a Supervisory Board, the change in the status of KPK employees to Civil Servants (ASN), and the placement of the KPK within the executive branch. These changes have sparked debate regarding their compatibility with the principle of the rule of law as stipulated in Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the implications of the principle of the rule of law on the independence of the Corruption Eradication Commission following the enactment of Law No. 19 of 2019. This study employs a normative legal research method. The legal sources consist of primary legal materials, such as legislation and Constitutional Court decisions; secondary legal materials, such as books and national and international journals; and relevant tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively using legal interpretation and legal argumentation methods. The research findings indicate that the KPK's independence is a manifestation of the principles of the rule of law, particularly the principles of the supremacy of law, the limitation of power, the separation of powers, equality before the law, and the guarantee of law enforcement free from interference. The enactment of Law No. 19 of 2019 has had implications for the KPK's independence through the strengthening of oversight mechanisms and changes to its institutional structure, which have the potential to reduce the scope of independence in carrying out its anti-corruption functions. Following the enactment of Law No. 19 of 2019, the KPK is viewed as having shifted from an independent specialized agency to an institution more closely aligned with the executive branch. Therefore, legal safeguards for the KPK's independence are necessary to ensure it remains consistent with the principles of the rule of law and the goal of effective anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: Rule of Law, KPK Independence, Corruption Eradication Commission, Law Number 19 of 2019, Corruption Eradication.